Center for Market Education Indonesia

CME-ID Policy Brief Nr 1
Jan 2023

Menuju Strategi Harm Reduction Ilmiah: Sebuah Pengantar Teoritis

Carmelo Ferlito

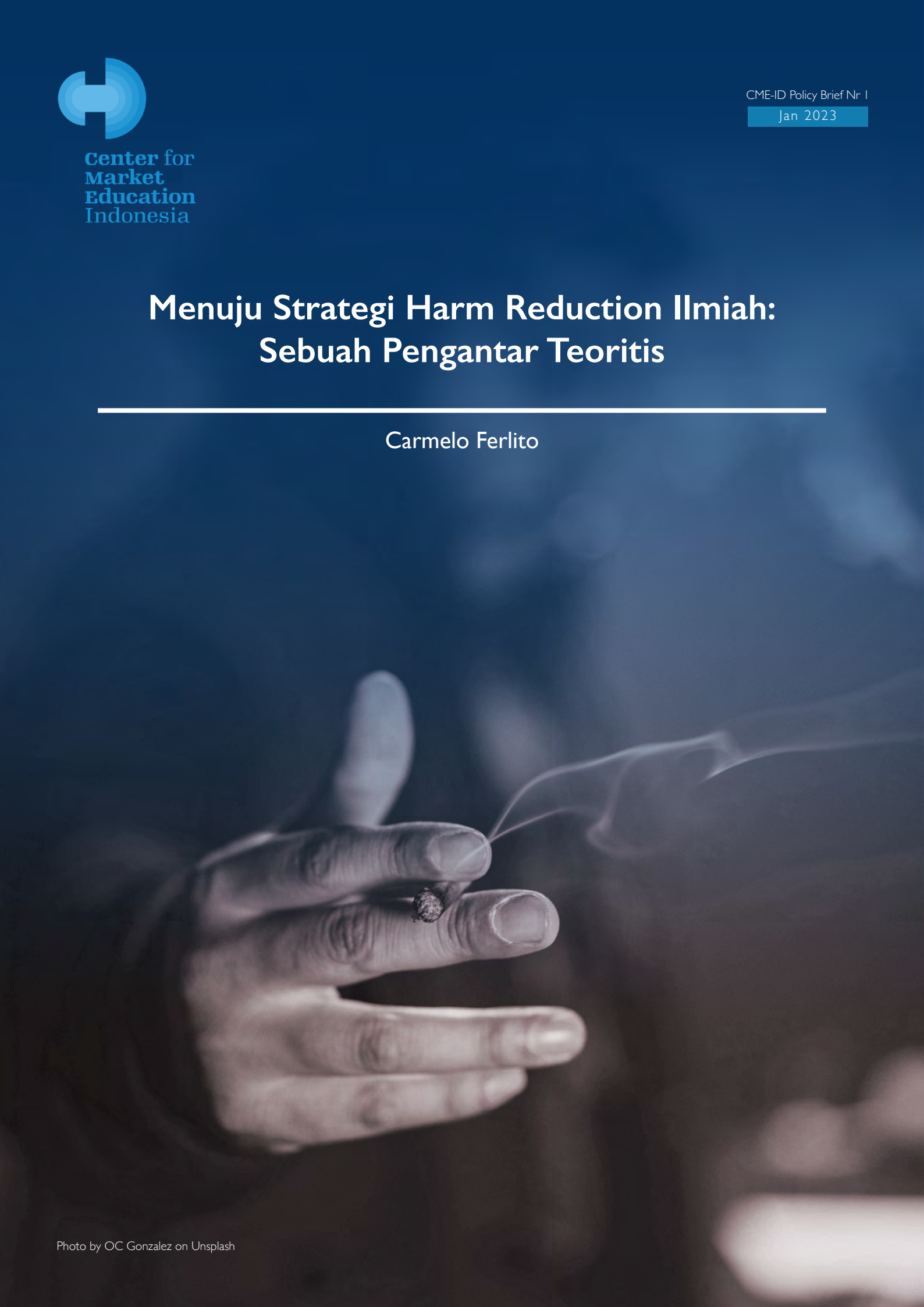

Photo by OC Gonzalez on Unsplash

Center for Market Education

Dr Carmelo Ferlito – CEO,
Center for Market Education, Malaysia

Saya tidak tahu. Semuanya. Hidup. Merokok
Jawaban Jean-Paul Sartre Ketika ditanya seorang wartawan mengenai hal yang paling penting dalam hidupnya[1].

1. Pengantar: Berpikir seperti seorang ekonom

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan sejumlah masukan dari teori dan sejarah ekonomi ke dalam kategori "konsumsi kesenangan" (*pleasure consumption*), yaitu konsumsi barang-barang yang lazim disebut sebagai "barang dosa" atau "tercela", seperti alkohol dan tembakau. Masukan yang penulis sertakan dapat juga diterapkan dalam pasar "barang tercela" lainnya semisal seks dan perjudian, misalnya.

Gagasan-gagasan dalam tulisan ini dapat menjadi dasar perumusan strategi *harm reduction* (pengurangan dampak buruk) yang efektif. Penulis menanggap bahwa urusan kesehatan masyarakat terlampau penting untuk berkutat hanya di tataran ideologis atau menjadi ajang pertarungan idealisme belaka. Ekonomi – ilmu tentang tindakan manusia – telah berkembang sangat pesat dalam memahami pola dan kebiasaan konsumsi manusia sehingga hendaknya dapat pula dimanfaatkan untuk mengembangkan kebijakan yang rasional terhadap "barang kesenangan" (*pleasure goods*). Lebih lanjut, pendekatan semacam ini juga selayaknya didasarkan kepada analisa *trade-off* yang matang.

[1] *Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Sergio Maria Calzolari yang menyarankan kutipan ini dalam salah satu diskusi panjang mengenai ekonomi dengan penulis*

Photo by Hello I'm Nik on Unsplash

Titik tolaknya adalah berpikir seperti seorang ekonom.

Berpikir seperti seorang ekonom berarti bahwa kita berfokus kepada tiga aspek dalam realitas: *aksi, interaksi,* dan *konsekuensi* dari aksi dan interaksi tersebut – dimana konsekuensi ini dapat bersifat sengaja atau tidak sengaja (Heyne, Boettke dan Prychitko, 2014, hal. 5). Aksi dan reaksi menghasilkan fenomena sosial, yang merupakan hasil dari individu yang mengambil pilihan, menjawab ekspektasi/harapan untung atau rugi tambahan (Heyne, Boettke dan Prychitko, 2014, hal. 4).

Jika sebagian besar aksi dan interaksi ini menghasilkan konsekuensi diluar intensi/niat awal individu yang terlibat dalam transaksi, sejumlah konsekuensi tak sengaja (*unintended consequences*) ini ada yang muncul sebagai keuntungan atau kerugian yang langsung berimbas kepada *bystander* (orang lain).

Keuntungan atau kerugian ini biasanya disebut eksternalitas (eksternalitas positif bila membawa keuntungan dan eksternalitas negatif bila membawa kerugian). Saat kita menilai efisiensi sebuah pasar yang terpengaruh eksternalitas, hendaknya kita turut mempertimbangkan eksternalitas semacam ini (Cowen dan Tabarrok, 2010, hal. 178).

2. Menjelaskan eksternalitas

Kami berpendapat bahwa sebuah situasi ekonomi melibatkan eksternalitas konsumsi jika satu orang konsumen memiliki kepentingan secara langsung terhadap produksi atau konsumsi pihak lain. Sebagai contoh, saya jelas memiliki preferensi jelas tentang tetangga saya yang menyalakan musik dengan kencang pada jam 3 pagi, atau orang di sebelah saya di restoran yang menyalakan cerutu murahan, atau tingkat polusi asap mobil sekitar. Semua ini adalah contoh eksternalitas konsumsi negatif. Sebaliknya, saya juga memperoleh kesenangan saat mengagumi keindahan taman bunga tetangga saya – ini adalah contoh eksternalitas konsumsi positif (Varian, 2010, p. 644).

Mengacu kepada Varian (2010, hal. 645-646), kita dapat mengambil contoh dua teman sekamar, A dan B, yang keduanya memiliki preferensi mengenai uang, dimana A gemar merokok sementara B menyukai udara yang bersih. Jenis kesepakatan atau peraturan yang muncul dari kondisi ini akan sangat bergantung kepada struktur hak milik yang ada: antara A yang berhak untuk merokok semaunya dan B yang tidak punya pilihan selain menerima; atau alternatifnya, B memiliki hak untuk menghirup udara bersih (bebas dari rokok sepenuhnya). Ini adalah situasi ekstrim, namun diantara dua situasi ini terdapat kemungkinan tak terbatas dimana hak legal untuk merokok dan menghirup udara bersih bisa saja muncul di tengah dua skenario berlawanan ini.

Initial endowment (modal awal) rokok tergantung sistem legal yang berlaku. Hal ini serupa dengan *initial endowment* barang-barang lain. Jika dikatakan bahwa A memiliki *initial endowment* sebesar $100 maka A dapat menggunakan $100 tersebut sesuka hatinya, atau ia bisa juga memberikannya kepada orang lain. Terdapat definisi legal dari kepemilikan saat dikatakan bahwa seseorang *"memiliki"* atau *"berhak atas"* $100. Demikian halnya jika seseorang dikatakan

memiliki atau berhak atas udara bersih maka itu berarti ia boleh menghirup udara bersih jika ia mau, atau malah memberikan/ menjual hak tersebut kepada orang lain. Dalam perspektif ini, memiliki hak atas udara bersih tidak jauh berbeda dari memiliki hak atas uang $100.

Mari kita mulai dari situasi legal dimana B memiliki hak atas udara bersih. Ini berarti baik A maupun B memiliki $100 dimana *endowment* (modal) awal – yang dimiliki semua orang secara bawaan tanpa didahului pertukaran – adalah udara bersih.

Salah satu aspek dari hak milik atas udara bersih adalah hak untuk menjual atau menukarkannya untuk hal lain yang diinginkan – dalam hal ini, uang. B boleh saja memilih untuk menukar sebagian haknya atas udara bersih untuk sejumlah uang.

Tentu, model hak milik lainnya juga memungkinkan. Kita dapat membayangkan sistem legal dimana A memiliki hak untuk merokok sebanyak yang ia mau, dan B mau tidak mau harus "menyogok" A untuk mengurangi konsumsi rokoknya.

Jika individu bebas untuk saling bertukar, maka mereka akan bertemu di suatu titik yang sesuai dengan preferensi mereka, yang dalam hal ini tergantung kepada hak milik terkait asap rokok dan uang beserta mekanisme pertukaran yang digunakan. Selama kita memiliki pemahaman hak milik yang jelas terhadap barang yang melibatkan eksternalitas, maka orang dapat bertukar dari posisi awal mereka menuju sebuah alokasi yang efisien. Kita juga bisa menciptakan semacam pasar eksternalitas untuk mendorong pertukaran.

Masalah hanya akan muncul jika hak milik tidak terdefinisikan dengan jelas. Jika A meyakini bahwa ia memiliki hak untuk merokok dan B meyakini ia memiliki hak untuk mendapatkan udara bersih maka masalah akan muncul. Masalah-masalah

Photo by Mari Helin on Unsplash

praktis terkait eksternalitas umumnya muncul akibat pendefinisian hak milik yang buruk, atau ketiadaan definisi hak milik, seperti dalam kasus hak untuk udara bersih.

Jika hak milik terdefinisi dengan jelas dan terdapat mekanisme untuk melakukan tawar menawar satu sama lain, maka orang dapat menukarkan hak mereka untuk menciptakan eksternalitas dengan cara yang sama mereka menukar hak mereka untuk memproduksi atau mengonsumsi barang-barang sebagaimana biasanya. Hal ini dicetuskan oleh Ronald Coase yang melalui analisanya mengenai ongkos transaksi dan hak milik ternyata memunculkan pasar baru yang sebelumnya tidak ada.

> Ronald Coase, seorang peraih penghargaan Nobel, merangkum situasi dimana hanya pasar yang dapat menyelesaikan masalah eksternalitas dalam teorema Coase-nya. Teorema Coasa menyatakan bahwa jika ongkos transaksi rendah dan hak milik terdefinisi dengan jelas, maka negosiasi pribadi akan memastikan kesetimbangan pasar menjadi efisien meskipun terdapat eksternalitas. Dengan kata lain, dalam kasus-kasus seperti ini adanya pertukaran memastikan hanya terjadi eksternalitas secukupnya. Jika eksternalitas terlalu sedikit atau banyak, maka mekanisme pertukaran akan mendorongnya ke tingkatan optimal.
>
> [...] Jika kondisi dalam teorema Coase terpenuhi, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang lebih meyakinkan bahwa dalam pasar yang bebas, jumlah barang yang terjual akan memaksimalkan surplus sosial, jumlah dari konsumen, produsen, dan surplus semua orang.

> Namun kondisi yang meniscayakan teorema Coase seringkali kecil kemungkinannya. Ongkos transaksi untuk banyak eksternalitas kerap mahal dan hak milik tidak terefinisikan secara jelas. Karenanya, pasar saja tidak akan menjawab semua permasalahan eksternalitas.
>
> Teorema Coase penting bukan karena gagasan bahwa pasar dengan sendirinya sudah cukup untuk menjawab semua permasalahan eksternalitas, namun pada gagasan baru—penciptaan pasar baru. Jika hak milik dapat didefinisikan dengan jelas dan ongkos transaksi dikurangi, maka pasar eksternalitas dapat tumbuh. Jika pasar sedemikain tumbuh, maka berdasarkan teorema Coase maka kita tahu bahwa pasar tersebut akan efisien selayaknya pasar biasa.
>
> Pemerintah dapat memainkan peran dalam mendefinisikan hak milik dan mengurangi ongkos transaksi. Malahan, belakangan banyak pemerintahan yang membantu menciptakan pasar yang efektif dalam banyak eksternalitas - sebuah validasi dari teorema Coase (Cowen dan Tabarrok, 2010, hal. 184).

Dalam contoh diatas, solusi yang dicetuskan teorema Coase akan berwujud kepada penciptaan sistem hak atau *voucher* untuk rokok atau udara bersih, dan pasar yang dikembangkan untuk hal ini.

Namun sebaliknya, dikarenakan hak milik tidak terdefinisikan dengan baik atau malahan tidak ada sama sekali, sejak publikasi Pigou (1920) dan evolusi *welfare economics* (ekonomi kesejahteraan), sebagian besar ekonom dan pembuat kebijakan malah meyakini bahwa kinerja pasar-pasar yang terdampak eksternalitas dapat diperbaiki dengan kebijakan publik. Namun, cara yang diterapkan kebijakan dalam bidang *welfare economics* adalah untuk membagi pilihan, perilaku, dan konsumsi dalam cara yang Manichean, dimana sejumlah tindakan atau pilihan beserta konsekuensinya dianggap tercela/buruk dan karenanya layak dihukum (umumnya melalui mekanisme perpajakan atau pelarangan).

Pendekatan semacam ini memiliki beberapa masalah.

3. Pilihan individu dan pembuatan kebijakan

Masalah pertama terkait dengan pembuat kebijakan yang cenderung mengabaikan kenyataan bahwa orang-orang yang terdampak eksternalitas negatif mungkin saja memilih hal tersebut dengan sukarela dan sadar akan risiko yang muncul. Alih-alih menganggap individu sebagai agen yang memilih dengan sukarela dan sadar risiko, pendekatan welfare economics menganggap individu sebagai agen ekonomi tidak mampu menimbang risiko dan memilih dengan tepat.

Dengan mengambil contoh merokok tembakau, «orang yang merokok melakukan hal tersebut karena nilai yang mereka lekatkan kepada manfaat yang diperoleh dari merokok melebihi ongkos merokok untuk mereka, termasuk persepsi risiko dampak kesehatan yang timbul. Demikian pula halnya dengan non-perokok yang memilih untuk membiarkan diri terekspos dengan ETS[2] selama periode tertentu yang melakukan hal tersebut karena manfaat yang mereka terima dari hubungan mereka dengan perokok melebihi ongkos yang dibayar. Dengan bersikap seolah-olah - baik dalam kasus perokok maupun non-perokok - pemerintah perlu melindungi masyarakat dari rokok sama saja dengan menganggap bahwa orang dewasa tidak sanggup mengambil keputusan rasional dan koheren terkait dengan kehidupan mereka sendiri» (Tollison dan Wagner, 1992, hal. 224).

Risiko yang tersirat dalam pendekatan *harm reduction* diatas, dimana orang dianggap tidak mampu menimbang risiko sendiri, adalah ketiadaan batasan mengenai apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki atau mengatur sesuatu. Malahan, jika kita menengok kebijakan Covid-19, dapat kita lihat «metodologi estimasi nilai sosial diterapkan secara terus-menerus ke dalam aktivitas keseharian, seperti olahraga, hobi komputer,

[2] *Environmental Tobacco Smoke (ETS) atau rokok pasif adalah terhirupnya asap rokok, atau disebut second-hand smoke, oleh orang selain perokok aktif. Hal ini terjadi ketika asap rokok memasuki sebuah ruang, yang menyebabkan asap rokok tersebut terhirup oleh orang di ruang tersebut.*

menyetir santai, dan lainnya» (Tollison dan Wagner, 1992, hal. 226). Sebagaimana Mises (1949, hal. 728-729), hampir seabad lampau dengan cemerlang mengingatkan:

> Opium dan morfin jelas merupakan narkotika berbahaya yang mengakibatkan kecanduan. Tapi begitu kita mengamini prinsip bahwa adalah tugas pemerintah untuk melindungi warganya dari kebodohannya sendiri, hilang sudah keberatan bagi perampasan lain yang mungkin terjadi. Contoh kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah pelarangan alkohol dan nikotin. Mengapa pemerintah berhenti hanya kepada perlindungan fisik/jasmani warganya saja? Bukankah bahaya yang dapat ditimbulkan ke dalam pikiran atau jiwa seseorang lebih berbahaya dari bahaya yang hanya mempengaruhi fisik/jasmani seseorang? Mengapa tidak sekalian menghalangi seseorang dari membaca buku atau lakon pementasan yang jelek, atau dari melihat lukisan, patung, dan musik yang jelek? Bahaya yang ditimbulkan ideologi-ideologi yang buruk tentu lebih meresahkan, baik bagi individu maupun masyarakat, daripada narkotika.

Posisi Mises mungkin tampak ekstrim atau berlebihan, namun pada kenyataannya hal ini sangat sering terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 1990-an pemerintah Kanada mengusulkan pelarangan 90 jenis keju susu murni (raw-milk), termasuk Camembert dan Roquefort, karena anggapan keterkaitan antara 14 kasus merebaknya isteria, salmonella dan E.coli, yang berakibat kepada 57 kematian dalam kurun waktu 25 tahun. Kemarahan publik berakibat kebijakan tersebut urung diimplementasikan (Kasper, Streit dan Boettke, 2012, hal. 327).

Peraih Nobel Ronald H. Coase[3] menerjemahkan pola pikir semacam ini dalam ulasannya mengenai eksternalitas. Dalam Coase (1960), ia menjelaskan bahwa masalah terkait ongkos sosial bersifat resiprokal (timbal balik): jika A merokok dan karenanya, ia membahayakan

[3] *Pada 1991, the Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Hadiah Sveriges Riksbank untuk Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel kepada Profesor Ronald Coase atas «temuan dan penjelasannya terhadap pentingnya ongkos transaksi dan hak milik untuk struktur institusional dan fungsional ekonomi». Materi kuliah penghargaan Nobel, The Institutional Structure of Production, dapat dilihat disini: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1991/coase/lecture/.*

B yang menjadi perokok pasif, maka harus diakui bahwa, untuk melindungi B, pilihan harus diambil untuk mengorbankan A dengan cara menghalangi A dari kesenangan merokok. Dalam usahanya mengubah pendekatan yang telah ada, Coase (1960, hal. 42-43) menekankan bahwa cara umum untuk mengatasi eksternalitas «berfokus kepada keburukan (deficiency) tertentu dalam sistem dan cenderung menyetujui anggapan bahwa apapun yang menghilangkan keburukan tersebut adalah baik (desirable)». Cara ini justru «mengalihkan fokus kita dari perubahan-perubahan lain dalam sistem yang mau tidak mau dikaitkan dengan tindakan korektif, perubahan yang sangat mungkin menimbulkan lebih banyak bahaya/ mudarat dibandingkan dengan keburukan awal» (sebagaimana yang akan kita lihat, contoh dalam hal ini adalah tumbuh suburnya pasar gelap rokok dalam rezim pajak tinggi).

Lebih lanjut, Coase (1960, hal. 43) menambahkan bahwa *welfare economics* tradisional secara *de facto* membandingkan hasil pasar *sebagaimana adanya* dengan kondisi yang hanya mungkin muncul dalam sebuah dunia yang ideal; dengan cara membandingkan seperti ini, alternatif yang muncul mustahil dapat dibandingkan dengan tepat «Sebenarnya tidak butuh terlalu banyak analisa untuk menunjukkan bahwa dunia ideal lebih baik dari kondisi pasar bebas (*laissez faire*), kecuali jika definisi *laissez faire* dan dunia ideal kebetulan sama. Tapi keseluruhan diskusi semacam ini tidak relevan bagi pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan ekonomi karena terlepas dari apapun yang kita anggap ideal, tidak jelas bagaimana cara untuk mencapai kondisi ideal tersebut dari posisi kita saat ini. Pendekatan yang lebih baik nampaknya adalah dengan memulai analisa dari situasi yang mirip dengan situasi aktual, untuk menguji dampak dari usulan perubahan kebijakan dan berusaha memutuskan apakah kondisi baru tersebut lebih baik atau buruk dari kondisi sebelumnya. Dengan cara ini, segala macam saran untuk kebijakan akan memiliki relevansi dengan kondisi aktual».

Singkatnya, Coase dalam usahanya menawarkan solusi terhadap eksternalitas yang mengusung kesetaraan semua pihak, mendorong sebuah pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif, dimana semua ongkos ditimbang, termasuk ongkos mengubah pranata

sosial, mengingat, sebagaimana knowledge problem (masalah pengetahuan) yang dijelaskan Hayek (1937, 1945), hasil akhir sebuah kebijakan dapat saja lebih buruk dari keadaan sebelumnya serta lebih jauh dari kondisi yang diinginkan. Coase mengajak kita untuk bersikap rendah hati ketika menyusun kebijakan.

Pentingnya kerendahhatian dalam menyikapi knowledge problem tidak dapat disepelekan.

Gambar 1: Ongkos eksternal.

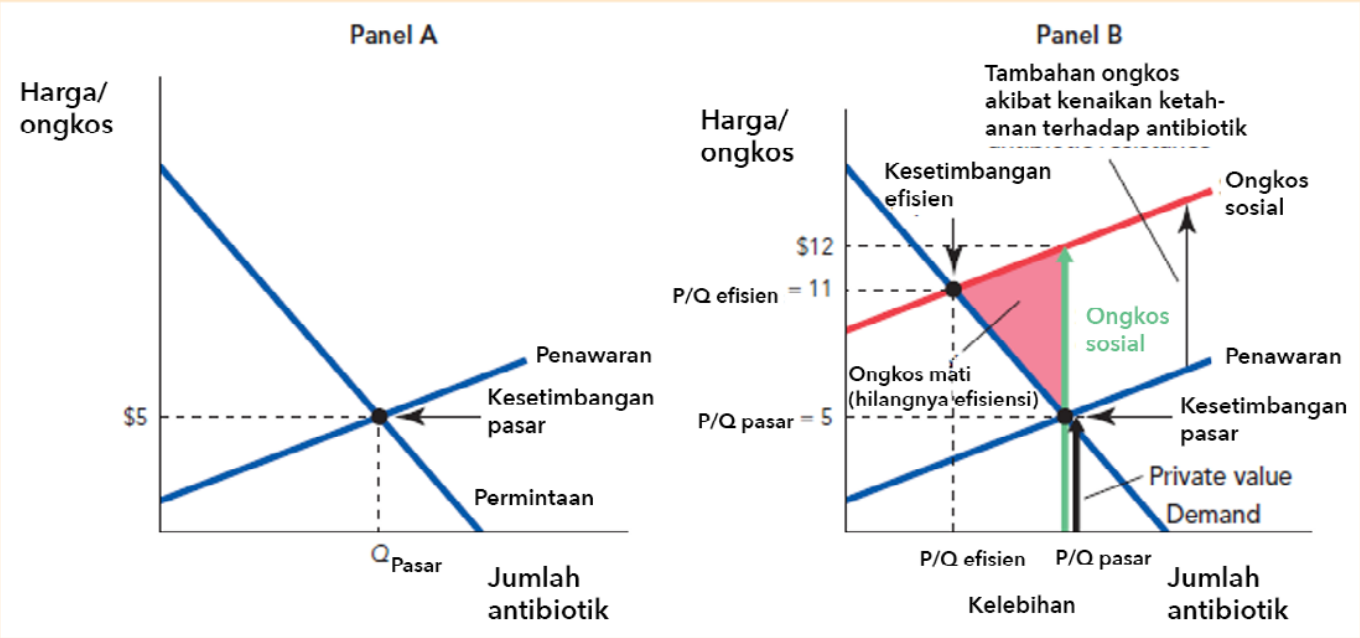

Ketika Ongkos Eksternal Signifikan, Keluaran Terlalu Tinggi

Panel A: kesetimbangan pasar terjadi, sebagaimana biasanya, ketika penawaran dan permintaan bertemu. Kesetimbangan pasar memaksimalkan surplus, baik bagi konsumen maupun produsen.

Panel B: Kita tambahkan ongkos eksternal ke dalam kurva penawaran untuk mencari tahu ongkos sosial. Perhatikan bahwa ongkos sosial Q Pasar melampaui nilai pribadi unit ini. Kesetimbangan efisien terjadi ketika ongkos sosial dan kurva permintaan bertemu. Q efisien lebih kecil daripada Q pasar sehingga pasar dipenuhi barang berlebih dengan disertai ongkos eksternal yang signifikan.

Sumber: Cowen and Tabarrok (2010, p. 180).

Grafik seperti diatas berguna untuk memahami asal suatu masalah, namun bukan *besarannya*. Karenanya, meski grafik seperti diatas dapat membantu kita memahami konsep eksternalitas beserta masalah yang ditimbulkannya, hendaknya grafik diatas tidak digunakan sebagai patokan kuantitatif untuk pembuatan kebijakan. Selain identifikasi kesetimbangan pasar (diluar pengertian teoritis)

yang rancu, perhitungan ongkos sosial pun tidak jelas. Campur tangan langsung melalui seumpama, mekanisme perpajakan, akan menghadirkan *knowledge problem* sebagai berikut: 1. Bagaimana cara menghitung ongkos sosial? serta 2. Kalaupun masalah 1. dipecahkan, bagaimana cara agar kita dapat memastikan bahwa hasil sebuah kebijakan akan menutupi (dari segi kuantitatif) ongkos sosial yang timbul, dan 3. Lebih mahal mana kebijakan tersebut dibandingkan dengan hasil yang diinginkan (analisa *trade-off*)?

Bersikap seolah mampu pertanyaan-pertanyaan diatas melahirkan kebijakan paternalistik yang didasari asumsi bahwa preferensi individu dapat diketahui dan diukur; kita sebaiknya menghindari godaan berpikir bahwa kebijakan tersebut membawa kita ke surga, karena alih-alih malah berujung neraka (Rizzo and Whitman, 2020).

Penulis meyakini bahwa «dalam iklim politik ekonomi saat ini, perjuangan kerendahhatian (*humility*) adalah medan perang paling serius antara mereka yang percaya dengan target terukur dan dapat dicapai (pretensi pengetahuan) dan mereka yang percaya "Ada lebih banyak hal di surga dan di bumi, Horatio, Dari yang diimpikan dalam filosofi Anda. (W. Shakespeare, *Hamlet*) (keterbatasan pengetahuan). Dewasa ini, perbedaan keduanya lebih penting daripada batasan-batasan tradisional lainnya antar mazhab ekonomi (Ferlito, 2022, hal. 308).

Kembali lagi, keluar dari pretensi pengetahuan berarti menggunakan pendekatan lain dalam merumuskan kebijakan secara umum, *dan harm* reduction secara khusus, sebagaimana yang akan penulis bahas selanjutnya.

4. Sejumlah masalah dengan perpajakan

Sebelum menjabarkan hal-hal yang perlu menjadi dasar pendekatan baru terhadap kebijakan *harm reduction*, untuk sejenak penulis akan membahas masalah-masalah terkait salah satu pendekatan *harm reduction* tradisional – perpajakan. Tak pelak lagi, memajaki perilaku "tercela" (*sinful*) membawa sejumlah masalah, baik dari segi teori maupun praktik.

Terdapat sejumlah kesepahaman antara para pakar perpajakan dan ahli bahwa sistem perpajakan yang umum dan luas lebih tidak diskriminatif dan menyimpang (*distortionary*) dibandingkan sistem yang sempit. Hal demikian didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ekuitas (*equity*) dan memang betul, pajak atas sebuah barang atau perilaku merupakan pelanggaran ekuitas, baik horizontal maupun vertikal (Tollison dan Wagner, 1992, hal. 20-24).

Pajak penjualan misalnya, memenuhi prinsip ekuitas horizontal jika tidak mendiskriminasi jenis konsumsi; dalam hal ini, pajak penjualan umum yang dikenakan berdasarkan jumlah konsumsi, tanpa memandang barang yang dikonsumsi. Sebaliknya, pajak atas rokok atau alkohol misalnya, «menciptakan inekuitas horizontal karena orang-orang yang memiliki jumlah belanja yang sama membayarkan pajak dengan jumlah yang berbeda untuk mendukung layanan umum pemerintah, hanya karena perbedaan barang yang mereka konsumsi» (Tollison dan Wagner, 1992, hal. 20).

Pajak "barang tercela: (*sin taxation*) «juga melanggar prinsip umum atas ekuitas vertikal, karena membebani masyarakat berpenghasilan lebih rendah dibandingkan masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi. Porsi anggaran yang digunakan untuk belanja untuk rokok umumnya menurun seiring kenaikan pendapatan. Alasan inilah yang membuat pajak tembakau merupakan pungutan yang sangat regresif» (Tollison dan Wagner, 1992, hal. 20).

Gambar 2: Pengeluaran tembakau dilihat dari persentase pendapatan.

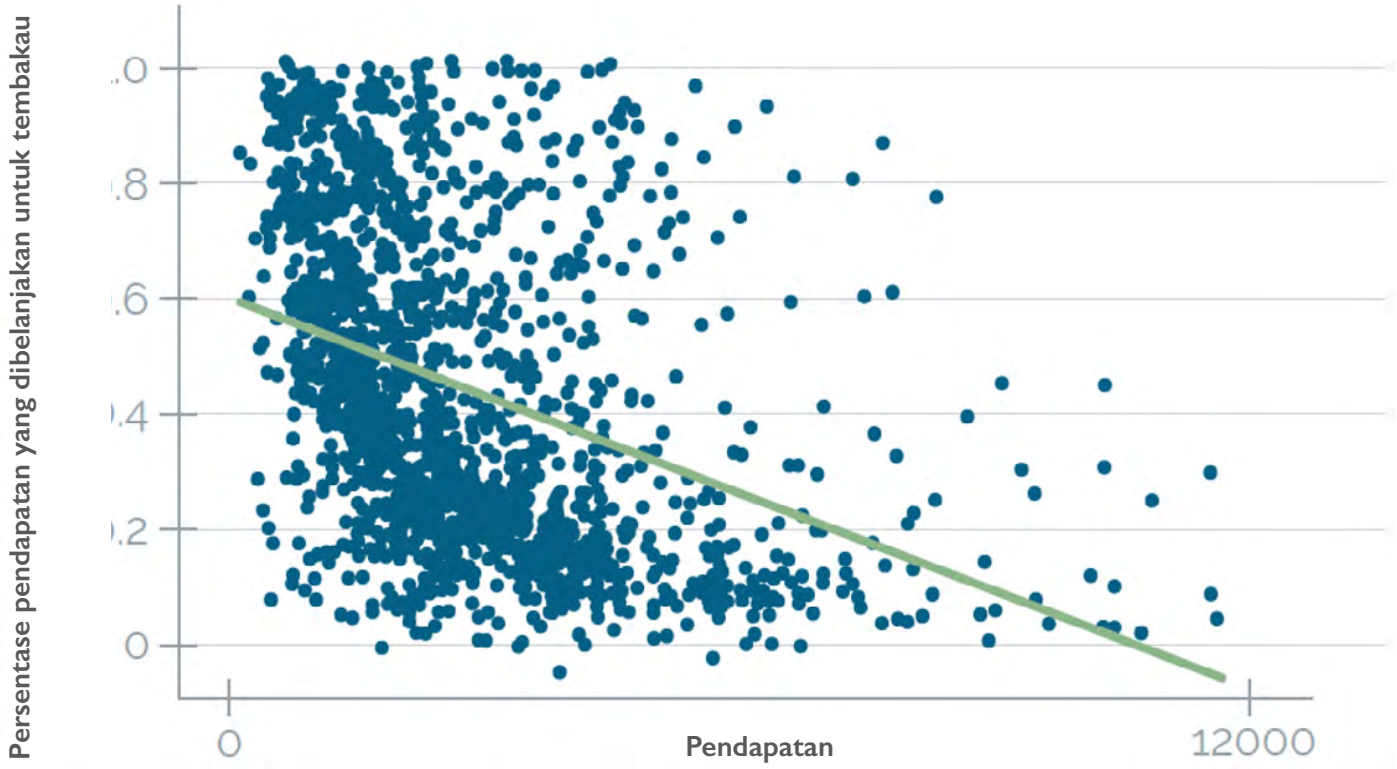

Sumber: Hoffer et al. (2021, p. 7).

Pajak barang tercela juga regresif karena alasan lain: barang semacam nikotin dan alkohol bersifat adiktif dan karenanya permintaannya cenderung inelastis, yang berarti tingkat konsumsinya cenderung tidak terpengaruh oleh naik turunnya harga. Hal ini berarti ketika harga barang-barang ini dinaikkan melalui pajak, permintaannya cenderung stabil; hal ini berarti kenaikan harga relatif lebih dirasakan oleh golongan berpenghasilan rendah
(Hoffer et al., 2021, hal. 6).

Hal ini juga benar karena, sebagaimana diketahui dari teori ekonomi, beban pajak memiliki dampak berbeda bagi pembeli atau penjual tergantung dari elastisitasnya. Barang yang permintaannya inelastis (sebagaimana yang tengah kita bahas), beban pajak lebih tinggi di sisi pembeli. Hal ini masuk akal karena permintaan inelastis menandakan keterbatasan/tidak adanya alternatif bagi konsumen (Cowen dan Tabarrok, 2010, hal. 99-101).

Sebagaimana dijelaskan oleh Ferlito (2017), 1) pihak yang menanggung biayanya belum tentu pihak yang membayar ke

pemerintah; 2) pihak yang sesungguhnya menanggung pajak tergantung dari elastisitas permintaan dan penawaran. Karenanya, hukum permintaan dan penawaran perlu menjadi perhatian.

Mari kita sederhanakan contohnya, melalui contoh dan pengertian yang mudah dipahami. Pertama, kita mengetahui bahwa konsumen terlihat membayar pajak atas barang impor, padahal dibalik itu tujuannya adalah menghukum penjual agar permintaan atas barang impor menurun. Bea biasanya adalah pajak yang dikenakan untuk setiap unit barang yang dibeli. Namun yang terjadi sebenarnya adalah, beban itu dibagi-bagi antara penjual dan pembeli. Sebagai misal, rokok di Malaysia, tanpa cukai, harga pertemuan antara permintaan dan penawarannya adalah RM 7 sebungkus, untuk 100 bungkus rokok setahun. Pemerintah Malaysia kemudian mengenakan cukai senilai RM 2 per bungkus rokok; permintaan rokok diperkirakan menurun. Kita anggap kesetimbangan baru tercapai di angka 800 bungkus per tahun, pada harga RM 6.5 per bungkus (penurunan permintaan berimbas kepada penurunan harga). Konsumen kini membayar RM (6.5 = 2) = 8.50 per bungkus, sementara penjual mendapat RM 6.50. dengan demikian beban cukai yang ditanggung konsumen adalah harga baru (RM 8.5) dikurangi harga lama (RM 7), yaitu RM 1.5. Sebaliknya, beban cukai yang ditanggung penjual adalah RM (7 – 6.50) = 0.50. Dalam contoh ini, beban cukai terbanyak ditanggung oleh konsumen.

Adakah cara untuk mengetahui apakah biaya akan lebih banyak ditanggung penjual atau pembeli? Sesungguhnya, terdapat cara untuk mengetahuinya. Menggunakan jargon ekonomi yang lazim dipakai, kita boleh berkata bahwa pihak yang menanggung biaya (atau membayar pajak secara umum) bukanlah pihak yang membayar uang dalam jumlah fisik; namun, ditentukan oleh elastisitas relatif permintaan dan penawaran. Elastisitas mengukur seberapa responsif (sensitif) jumlah permintaan (atau penawaran) suatu barang terhadap perubahan harga. Sebuah permintaan disebut elastis jika reaksinya terhadap perubahan harga cukup sensitif. Sebagai contoh, permintaan disebut lebih elastis jika kita mudah menemukan barang pengganti/substitusinya; sebaliknya, sebuah barang yang

Photo by Andres Siimon on Unsplash

menimbulkan ketergantungan (seperti rokok) membuat permintaan atas barang tersebut kurang elastis. Sebagaimana dijelaskan dengan cemerlang oleh Cowen dan Tabarrok, jika permintaan lebih elastis daripada penawaran (permintaan lebih sensitif terhadap perubahan harga maka konsumen menanggung beban pajak lebih sedikit daripada penjual. Sebaliknya, jika penawaran lebih elastis daripada permintaan, maka penjual menanggung beban pajak lebih sedikit daripada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas mampu menjadi celah keluar dari beban pajak; mekanismenya sangat mudah dipahami. Jika mudah untuk berhenti mengonsumsi sesuatu karena banyaknya pengganti/subtitusi, alih-alih membayar lebih mahal, kita tentu berharap dapat berpindah ke barang pengganti/substitusi. Sebaliknya jika kita tergantung (memiliki kecanduan) terhadap sebuah barang, maka kita akan cenderung memilih untuk membayar harga yang lebih tinggi dibanding berhenti mengonsumsinya.

Sementara itu, bukti menunjukkan bahwa kenaikan harga untuk barang semacam rokok yang diakibatkan cukai menyebabkan tumbuh suburnya pasar gelap, yang menyediakan barang dengan harga murah namun kualitasnya meragukan. Pada tahun 2019, rokok gelap mencakup 59.7% pasar, sementara Malaysia sendiri berada di angka 63% untuk penetrasi barang-barang gelap.

Gambar 3: Insiden rokok ilegal di Malaysia

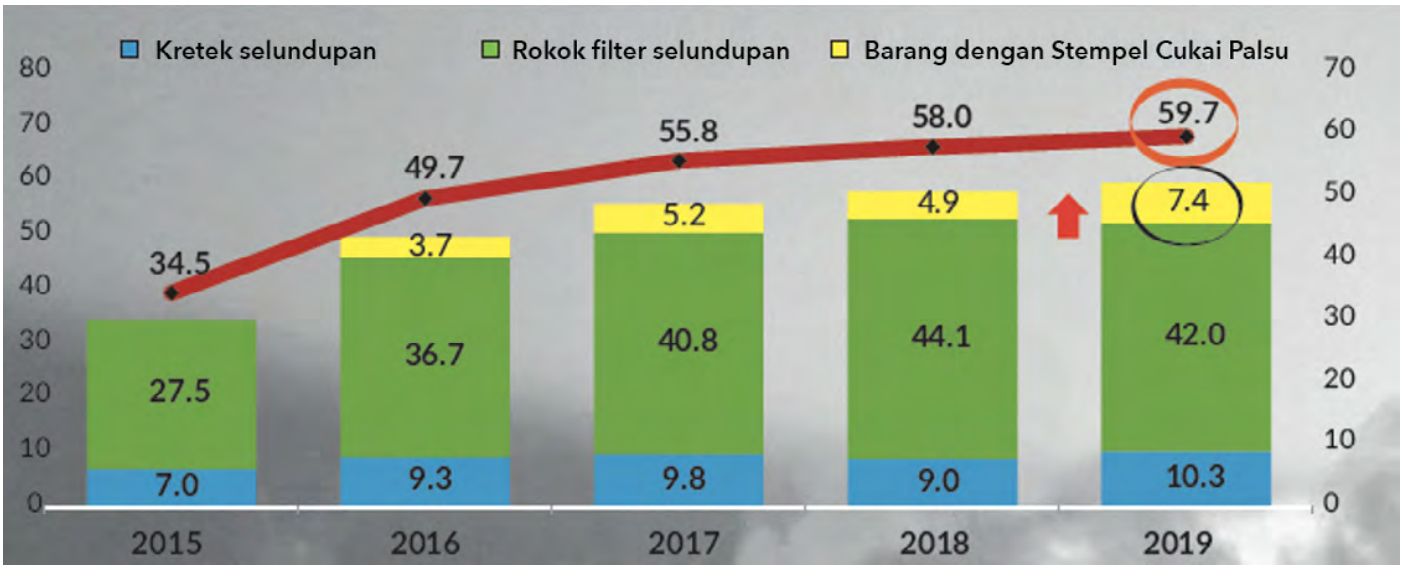

Sumber: The Star (2019).

Sementara 60% barang-barang di pasaran dibanjiri barang gelap, 30% adalah kuota rokok legal 10% mewakili barang konsumsi nikotin alternatif lainnya seperti vape dan rokok elektronik (The Star, 2019).

Di saat cukai mengakibatkan kenaikan harga rokok legal naik sekaligus kenaikan pangsa pasar rokok gelap, harga rokok gelap cenderung tetap.

Source: The Star (2019).

Gambar 4: Cukai rokok dan harga rokok di Malaysia

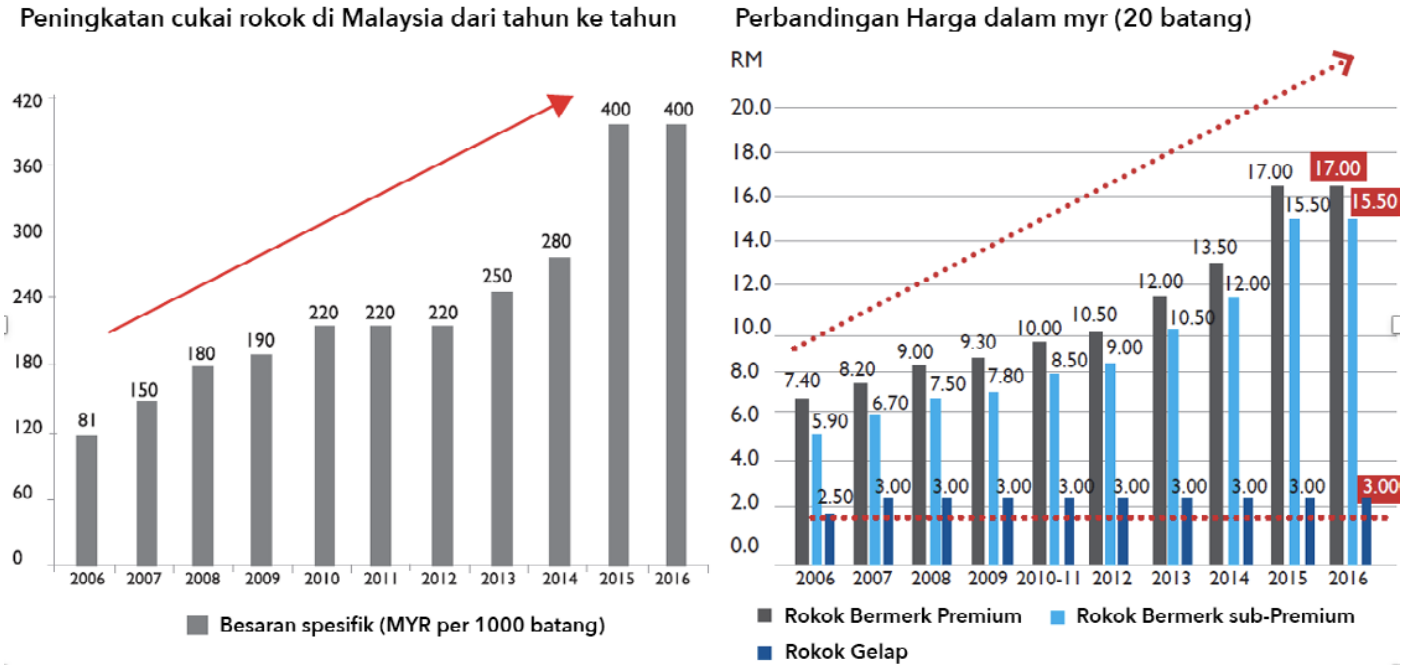

Sumber: Mitchell (2017, p. 11).

Bahkan argumen bahwa perokok layak dipajaki karena membebani anggaran kesehatan umum (eksternalitas fiskal) sesungguhnya argumen yang lemah berdasarkan bukti terkini.

«Jelas, perokok menyedot pengeluaran kesehatan yang lebih besar daripada bukan perokok setiap tahun sepanjang hidupnya. Namun di sisi lain, perokok juga cenderung berumur lebih pendek, dan umur yang pendek berarti pengeluaran kesehatan yang lebih kecil. Banyak studi di berbagai negara menunjukkan bahwa efek yang terakhir lebih mendominasi daripada yang pertama, baik jika dilihat dari ongkos kesehatan saja […] atau juga bila mengikutsertakan ongkos pensiun […]. Dengan kata lain, perokok justru menghemat uang pembayar pajak – sehingga argumen eksternalitas fiskal harusnya mendorong orang untuk merokok alih-alih membatasinya. Ongkos kesehatan seumur hidup juga tampak lebih rendah bagi orang-orang dengan obesitas dibandingkan dengan yang tidak dengan alasan yang sama persis: pengeluaran yang tinggi tertutup oleh pengeluaran yang singkat, lagi-lagi karena angka kematian yang lebih besar […]. Argumen eksternalitas fiskal agaknya harus mendorong obesitas juga» (Rizzo dan Whitman, 2020, hal. 608-609).

Pertimbangan diatas berlaku untuk undang-undang (UU) yang disebut *Generational End Game* (GEG) yang diusung oleh mantan Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin sebelum bubarnya parlemen. Pemerintah saat itu berharap mampu meloloskan sebuah peraturan yang melarang penjualan rokok dan barang-barang tembakau lainnya kepada orang yang lahir diatas tahun 2005; peraturan yang mirip dengan zaman Pelarangan (*Prohibition*) di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1920-an. Sayangnya, sebagaimana perpajakan, pelarangan juga tidak berhasil dalam upaya memberantas "konsumsi kesenangan".

Apakah pelarangan pada masa itu berhasil mengurangi konsumsi alkohol? Justru sebaliknya. Saat Undang-Undang Volstead yag melarang pembuatan dan penjualan minuman beralkohol disahkan pada tahun 1919, organisasi kejahatan terorganisasi di Amerika malah menyeruak dan menjadi-jadi. Sebelumnya, para mafiosi hanya menyasar orang-orang keturunan Italia di AS. Namun setelah Pelarangan berlaku, diperkirakan setidaknya 75% populasi AS menjadi klien *mafiosi*.

Bisnis ini merupakan bisnis raksasa. Sebelum UU Volstead terdapat 16,000 saloon di AS. Tempat-tempat ini kemudian diganti oleh 32,000 tempat minum ilegal yang dikenal dengan nama "*speakeasy*". Dengan harga alkohol yang semula naik dua kali lipat melambung menjadi sepuluh kali lipat dibanding sebelum masa Pelarangan, keuntungan yang dikantongi oleh para penyelundup melimpah ruah. Secara keseluruhan, konsumsi alkohol malah meningkat dua kali lipat sementara alkohol tercemar marak beredar yang menyebabkan setidaknya 1,000 kematian per tahun selama masa Pelarangan.

Pelarangan juga berdampak buruk bagi perdagangan dan lapangan kerja mengingat puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan ketika tempat-tempat pembuatan dan penjualan minuman beralkohol ditutup. Pemerintah AS juga mencatat penurunan pendapatan yang drastis. Secara nasional, Pelarangan menyebabkan kehilangan pendapatan pajak sebesar US$ 11 miliar bagi pemerintah AS sementara penerapannya menghabiskan US$300 juta. Sebuah komisi nasional yang dibentuk pada tahun 1929 juga mengritik

penerapan UU Volstead dan mencatat besarnya penolakan dari masyarakat terhadap Pelarangan.

Menariknya, jika cukai membuat harga rokok legal menjadi tinggi, harga rokok ilegal cenderung tidak berubah. Hal ini tak pelak membuat pangsa pasar rokok ilegal semakin naik. Diperkirakan setiap tahunnya pemerintah kehilangan pendapatan pajak senilai RM 5.1 miliar. Jika legislasi yang digagas Khairy disahkan, jumlah rokok ilegal yang beredar di pasar dan kehilangan pendapatan diperkirakan akan naik secara signifikan.

Hal ini akan semakin menekan upaya kementerian keuangan untuk memberantas perdagangan gelap dan memundurkan semua upaya memberantas perdagangan gelap yang selama ini sudah dilakukan. Sebagaimana pelajaran yang dapat dipetik dari masa pelarangan minuman beralkohol di AS, legislasi sedemikian dapat berdampak serius bagi perdagangan dan lapangan kerja di sektor terkait, sembari membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat.

Pada akhirnya, bukan hanya pasar yang akan dikuasai penyelundup, namun barang-barang yang tersedia juga akan berkualitas rendah. Beban pajak tinggi akan semakin menumpuk kepada golongan berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, jelas bahwa pendekatan harm reduction – atau konsumsi kesenangan – yang berdasarkan hukuman (perpajakan atau pelarangan) membawa sejumlah masalah:

- Pengekangan atas kebebasan memilih
- Target kebijakan yang tidak realistis
- Pelanggaran ekuitas horizontal dan vertikal dalam mekanisme perpajakan
- Pasar gelap dan penyelundupan yang tumbuh kian subur
- Pengangguran
- Kehilangan pendapatan pemerintah

Disini, perubahan paradigma betul-betul diperlukan.

5. Kebebasan memilih, inovasi, dan *harm reduction*

Sebagaimana dikemukakan oleh Hoffer at al. (2021) serta di Hoffer dan Ferlito (2021), sebuah pendekatan *harm reduction* yang baru hendaknya didasari tiga pilar berikut:

- Penggunaan ganjaran (reward) sebagai insentif perubahan perilaku
- Fokus kepada pengurangan produk tradisional, sembari mengurangi hambatan dan pajak terhadap barang alternatif yang lebih sehat (vape, bir bebas alkohol, etc.)
- Fokus kepada penciptaan lingkungan yang memberi insentif untuk inovasi

Kedua poin terakhir saling terkait dan lahir dari ide bahwa kebijakan *harm reduction* yang efektif harus berfokus kepada pemberian insentif untuk barang-barang alternatif kepada konsumen: mengganti perilaku lebih mudah daripada menghilangkan perilaku. Kebijakan *harm reduction* akan lebih efektif dalam mencapai target apabila barang yang lebih aman/tidak berbahaya muncul sebagai alternatif; kuncinya adalah mempertahankan elemen "kesenangan" bagi konsumen, sembari menghilangkan bahayanya.

Di tengah keberadaan barang-barang yang permintaannya inelastis, akan jauh lebih mudah untuk menggeser daripada menghilangkan konsumsi sama sekali. Lebih lanjut, sebagaimana yang telah kita lihat, sebagian dari inelastisitas timbul dari ketiadaan barang pengganti yang mengakibatkan konsumen lebih terpengaruh dampak kenaikan cukai: konsumen menanggung kenaikan pajak lebih besar dibanding kehilangan yang ditanggung penjual akibat penurunan permintaan.

Namun barang alternatif membutuhkan iklim yang kondusif untuk inovasi agar bisa tumbuh dan berkembang di pasar. Manusia tidak

akan kekurangan semangat inovasi: jika dihadapkan dengan tantangan sembari diberi insentif, kecerdasan manusia tak mengenal batas.

Tentu kita tidak mengetahui inovasi apa yang akan muncul di kemudian hari. Tetapi kita dapat menawarkan panduan kebijakan berdasarkan bukti dari inovasi-inovasi yang telah terjadi. Agar inovasi tumbuh subur, lingkungan institusional yang tepat adalah kuncinya; dalam triloginya yang cerdas, McCloskey (2006, 2010, dan 2016) menjelaskan bahwa kebebasan adalah aturan institusional paling penting yang mampu menumbuhkan inovasi dan pertumbuhan – dan dengannya – kemajuan. «yang penting adalah kreativitas manusia yang dimerdekakan oleh liberalisme», tulis McCloskey (Sunde, 2019).

Malahan, sebagaimana dijelaskan Schumpeter (1911), meski awalnya menghadapi lingkungan yang tidak mendukung, wirausahawan (entrepreneur) yang inovatif akan mampu menggoncang pasar dan mengubah hidup konsumen jika, melalui panggilan "perang" itu mereka mampu memetik kemenangan.

Eksperimen dan inovasi akan tumbuh subur jika didukung, didorong, dan diberi insentif. Hambatan dan ongkos menghalangi eksperimen dan inovasi. Untuk mendorong inovasi besar berikutnya – yang kiranya mampu menyelamatkan jutaan nyawa manusia setiap tahunnya – kebijakan publik perlu berfokus mendorong dan memberi insentif untuk eksperimen, sembari menangkat hambatan sebanyak mungkin agar tercipta proses pengembangan dan penjualan barang dan jasa baru.

Dalam hal ini, agar kebebasan tak menjadi untaian kata-kata belaka, sistem perpajakan yang ramah harus dikembangkan, dimana konsumen memiliki keuntungan bukan saja dari mengubah kebiasaan buruk/tidak sehat, namun juga keuntungan dari segi finansial. Pengurangan atau penghapusan cukai atau pajak atas rokok elektronik, tembakau tanpa asap, dan produk alternatif lainnya menjadi langkah awal yang patut dicoba. Penurunan penerimaan fiskal dapat ditutup oleh penurunan ongkos kesehatan

dan potensi kehilangan pendapatan domestik bruto (PDB). Lebih lanjut, mendorong inovasi melalui pertumbuhan ekonomi akan mempercepat penciptaan kesejahteraan dan karenanya membawa tambahan manfaat fiskal yang ditimbulkan sebagai efek turunan dari inovasi (Hoffer et al., 2021).

6. Kerangka kerja institusional yang tepat

Meski demikian, reformasi perpajakan hanya sebagian dari kerangka kerja yang tepat yang mampu menyuburkan inovasi dan kewirausahaan, dengan kebebasan sebagai elemen kunci dari pelembagaan institusi semacam itu. Indeks Hak Milik Internasional (*International Property Rights Index*) atau IPRI dapat menjadi mitra penting untuk memahami siap tidaknya Malaysia menyuburkan inovasi.

IPRI memuat rangkuman komprehensif mengenai hak kepemilikan di setiap negara. Lebih lanjut, IPRI juga menyertakan analisa dengan indeks lainnya, semisal kemudahan berusaha.

Berikut adalah tiga komponen kunci IPRI:

- Iklim Hukum dan Politik (*Legal & Political Environment*);
- Hak Milik Fisik (*Physical Property Rights*);
- Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI (*Intellectual Property Rights*).

Komponen Iklim Hukum dan Politik (LP) memberi informasi mengenai seberapa kuat komitmen institusi-institusi di suatu negara dalam melindungi dan menjunjung 'aturan main' antar warganya. Oleh karena itu, komponen ini mencakup berbagai hal yang amat luas. Komponen ini memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan dan perlindungan hak milik fisik dan kekayaan intelektual.

Dua komponen lain dalam indeks, hak milik fisik dan intelektual, mencerminkan dua bentuk hak milik yang penting bagi perkembangan sosio-ekonomi suatu negara. Hal-hal yang termasuk dalam komponen ini mewakili hak *de jure* dan peluang/kesempatan de facto di masing-masing negara.

Terlepas dari banyaknya hal yang terkait dengan hak milik, skor final IPRI secara spesifik tergantung kepada faktor kunci yang terkait dengan kekuatan perlindungan hak milik fisik dan intelektual. Lebih lanjut, item-item yang data antar negaranya dapat diakses mendapat prioritas, hal ini membuat skor indeks dapat dibandingkan antar negara dan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, skor IPRI Malaysia turun sebesar -0.399 poin menjadi 6.3, atau peringkat ke-8 di wilayah Asia dan Oceania (dari peringkat ke-7 pada tahun 2021) dan peringkat ke-29 dari seluruh negara-negara di dunia.

Gambar 5: Skor Indeksi Hak Milik Internasional (IPRI) 2022 Malaysia

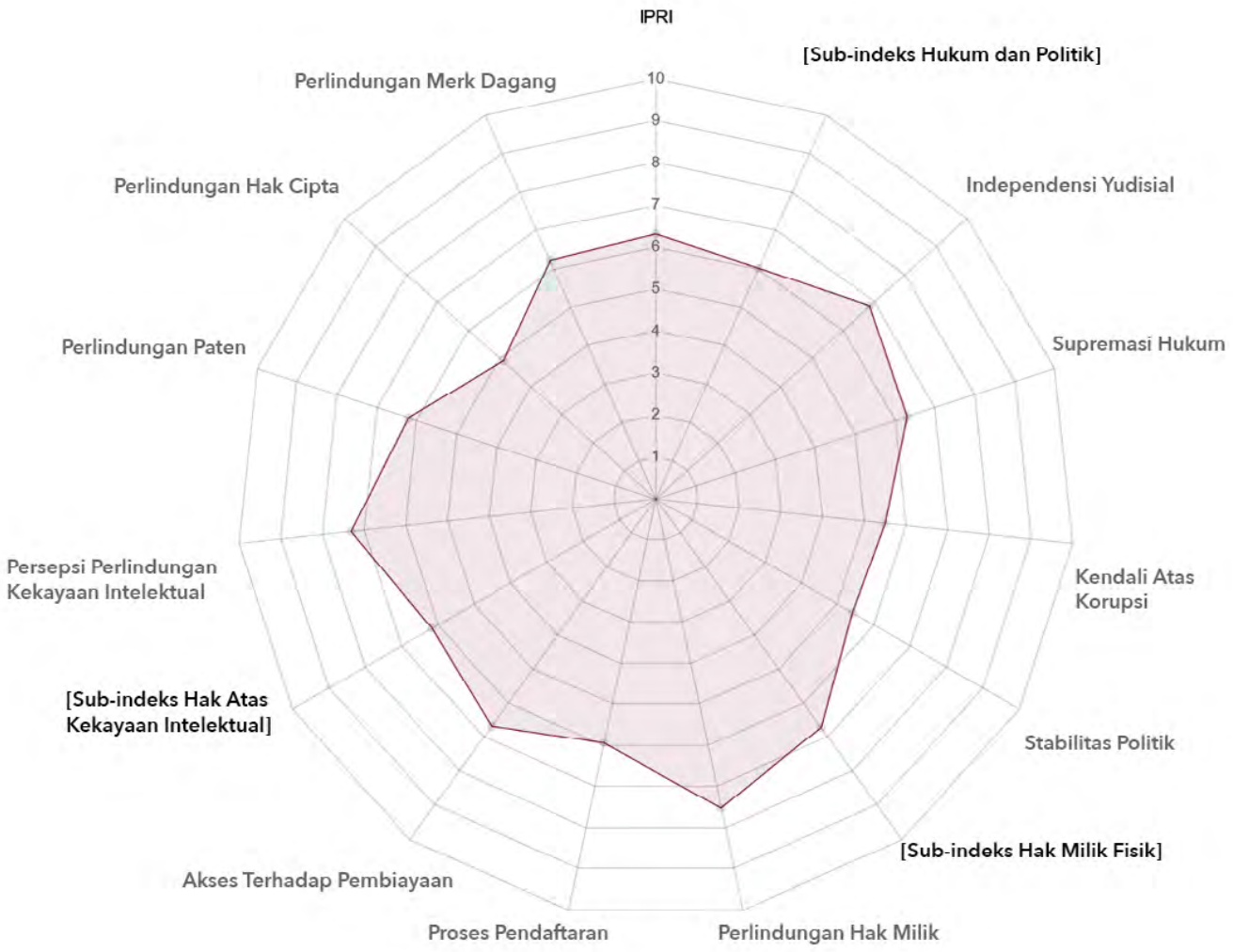

Sumber: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/malaysia.

Gambar 6: Sub-Indeks IPRI Malaysia dari kurun 2007-2022.

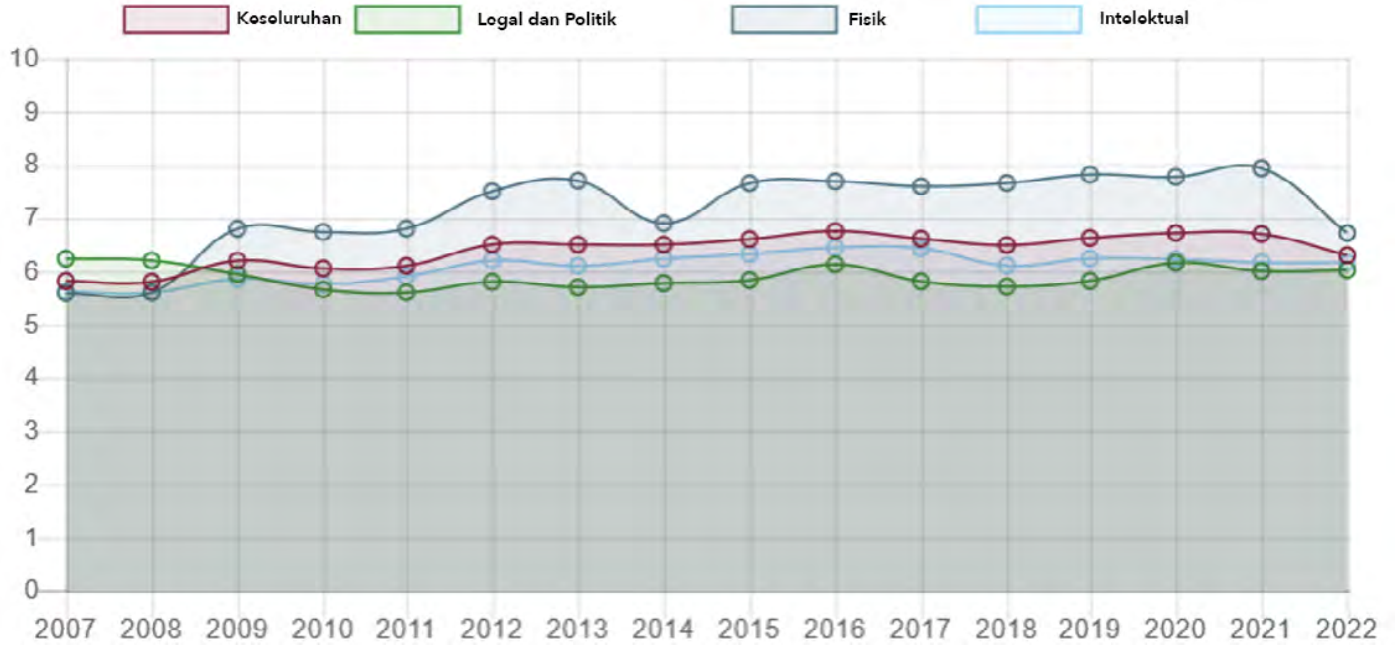

Sumber: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/malaysia.

Komponen Iklim Hukum dan Politik berfokus kepada kemampuan sebuah negara menegakkan sistem *de jure* hak milik. Pendekatan komponen ini adalah dengan menilai kondisi umum suatu negara dalam membatasi penggunaan kekuasaan dan stabilitas untuk warga negara. Komponen ini memiliki empat (4) elemen: independensi sistem yudisial, kekuatan supremasi hukum, stabilitas sistem politik, dan kendali atas korupsi.

Independensi Yudisial menguji sejauh mana kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh politik, individu, atau bisnis. Independensi yudisial adalah fondasi sentral perlindungan dan kedaulatan sistem peradilan terkait hak milik individu.

Supremasi Hukum mengukur kepercayaan dan perilaku para pihak terkait aturan hukum yang berlaku, khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik, kepolisian dan peradilan, dan juga kemungkinan kriminalitas dan kekerasaan. Elemen ini mengombinasikan beberapa indikator, termasuk keadilan, kejujuran, penegakan, kecepatan, keterjangkauan sistem peradilan, perlindungan hak milik individu, serta akuntabilitas kehakiman dan eksekutif.

Elemen Supremasi Hukum melengkapi elemen Independensi Yudisial. Stabilitas politik mendukung insentif untuk memperluas kepemilikan dan/atau pengelolaan kepemilikan. Semakin besarnya kemungkinan instabilitas pemerintahan, semakin kecil kemungkinan orang akan memiliki properti dan merasa aman atas hak-hak mereka. Kendali atas korupsi mengombinasikan sejumlah indikator yang mengukur sejauh mana kewenangan publik digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini termasuk korupsi baik skala kecil maupun besar, dan juga negara yang 'tersandera' elit dan kelompok kepentingan. Sebagaimana elemen lain dalam komponen LP, korupsi memengaruhi kepercayaan publik dalam implementasi dan penegakan hukum terkait hak milik. Korupsi juga memengaruhi tingkat informalitas dalam ekonomi, yang merupakan halangan dalam menjunjung hukum hak milik pribadi.

Sub-indeks Hukum dan Politik Malaysia naik sebesar 0.02 menjadi 6.021 dengan skor 6.865 pada Independensi Yudisial, 6.317 pada Supremasi Hukum, 5.402 pada Stabilitas Politik, dan 5.499 pada Kendali Atas Korupsi.

Gambar 7: Skor Iklim Hukum dan Politik Malaysia, 2007-2022.

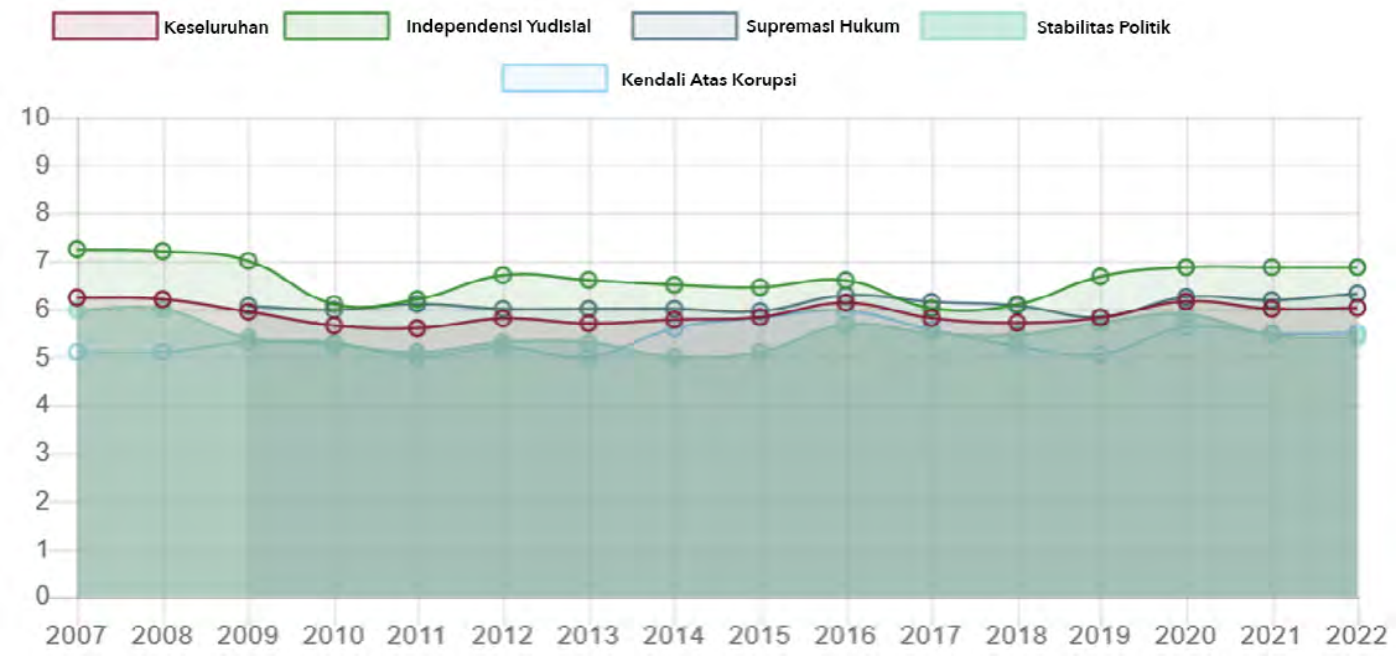

Sumber: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/malaysia.

Perangkat hukum kepemilikan yang kuat mendorong kepercayaan masyarakat akan efektivitas perlindungan hak milik. Selain itu, perangkat yang kuat juga memberi sistem yang efektif, efisien, dan terintegrasi untuk mendaftarkan kepemilikan membuka akses terhadap kredit untuk menjadi pemilik atau mengubah properti menjadi modal. Karena inilah, komponen-komponen berikut digunakan untuk mengukur perlindungan terhadap hak milik fisik.

Perlindungan hak milik fisik terkait langsung dengan kekuatan sistem hak milik di suatu negara berdasarkan pandangan ahli atas kualitas perlindungan hukum untuk hak milik, termasuk aset-aset finansial. Hal ini ditambah juga dengan pandangan ahli mengenai kejelasan definisi legal hak milik di negara tersebut.

Elemen proses pendaftaran mengukur sejauh mana regulasi yang berlaku ditegakkan secara adil dan efektif, sebagai tolok ukur keadilan dan efisiensi dalam proses pendaftaran hak milik. Relevansi hal ini berangkat dari fakta bahwa semakin sulit registrasi suatu aset dilakukan, semakin cenderung aset tersebut mandek di sektor informal, yang artinya menghambat aset tersebut digunakan untuk bergerak ke nilai tambah tinggi.

Akses terhadap pembiayaan: institusi keuangan memainkan peran penting yang saling melengkapi – bersama dengan sistem hak milik – untuk menghadirkan aset-aset ke dalam sektor ekonomi formal yang membuka peluang perubahan dari ide menjadi investasi riil. Fasilitas kredit juga terbukti menjadi saluran ampuh untuk membasmi kemiskinan.

Sub-indeks hak milik fisik Malaysia turun sebesar -1.217 poin menjadi 6.716 dengan skor 7.525 untuk persepsi perlindungan hak milik fisik, 5.953 untuk proses pendaftaran, dan 6.669 untuk akses pembiayaan.

Gambar 8: Perlindungan Hak Milik Fisik Malaysia, 2007-2022.

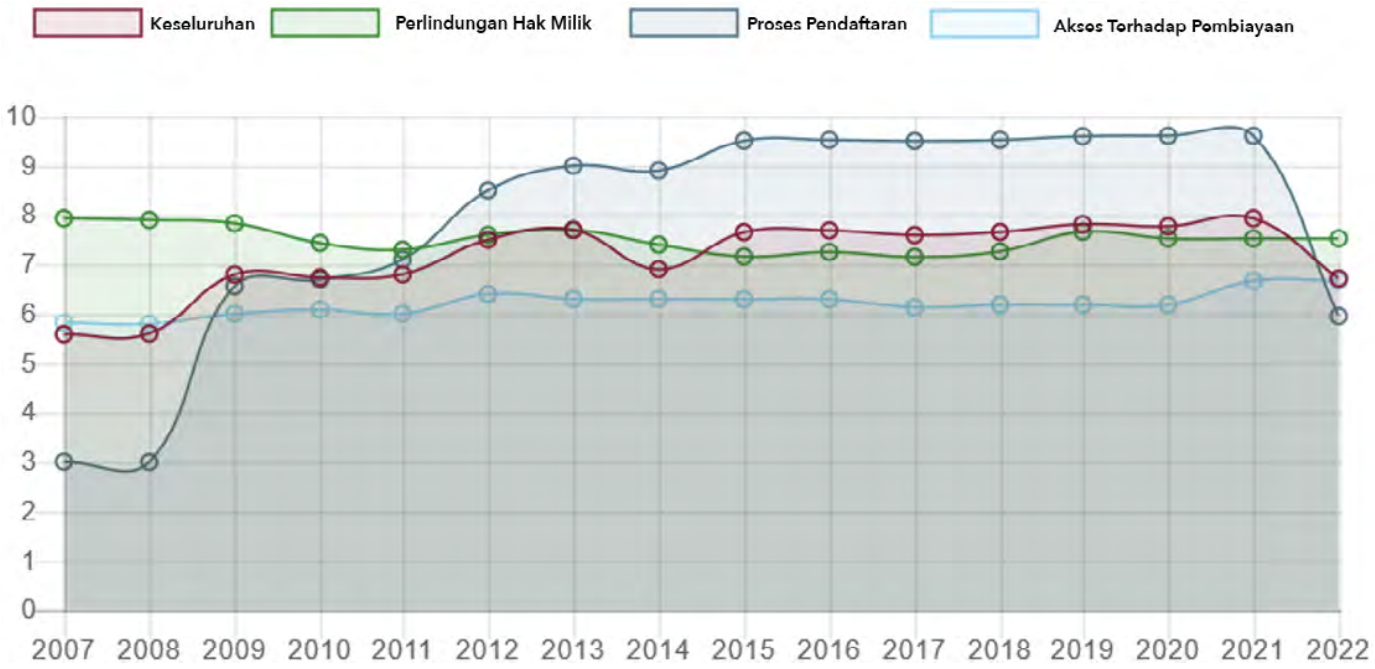

Sumber: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/malaysia.

Keberadaan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak berarti pemberian kepemilikan eksklusif (sebagaimana hak milik fisik), namun lebih kepada pembukaan terhadap akses pemanfaatan ekonomis, yang mendorong kemunculan insentif ekonomi untuk penelitian dan inovasi, sekaligus mempromosikan berkembangnya ide-ide baru yang secara tidak langsung merupakan turunan dari kreativitas. HAKI menjadi relevan terutama di tengah zaman yang sering disebut sebagai Masyarakat Pengetahuan (*Knowledge Society*).

Komponen HAKI menilai perlindungan hak milik jenis ini. Selain pengukuran berbasis persepsi, komponen ini juga mengukur tiga jenis kekayaan intelektual (paten, hak cipta, dan merk dagang), menggabungkan baik sudut pandang *de jure maupun* de facto.

Selanjutnya, komponen HAKI juga mengukur kekuatan hukum paten di suatu negara berdasarkan enam kriteria luas: durasi, cakupan, batasan, keanggotaan traktat internasional, mekanisme penegakan, dan aplikasi/pengajuan.

Perlindungan terhadap merk dagang mencerminkan kekuatan suatu negara dalam melindungi merk dagang berdasarkan empat kriteria luas: cakupan, keanggotaan traktat internasional, mekanisme penegakan, serta aplikasi/pengajuan.

Terakhir, perlindungan hak cipta mengukur level pembajakan di sektor kekayaan intelektual sebagai indikator penting efektivitas penegakan HAKI di suatu negara.

Skor sub-indeks HAKI Malaysia tidak berubah dan tetap berada di angka 6.162 dengan skor 7.319 untuk persepsi perlindungan HAKI, 6.215 untuk perlindungan paten, 4.9 untuk perlindungan hak cipta, serta 6.215 untuk perlindungan merk dagang.

Gambar 9: Perlindungan HAKI Malaysia, 2007-2022.

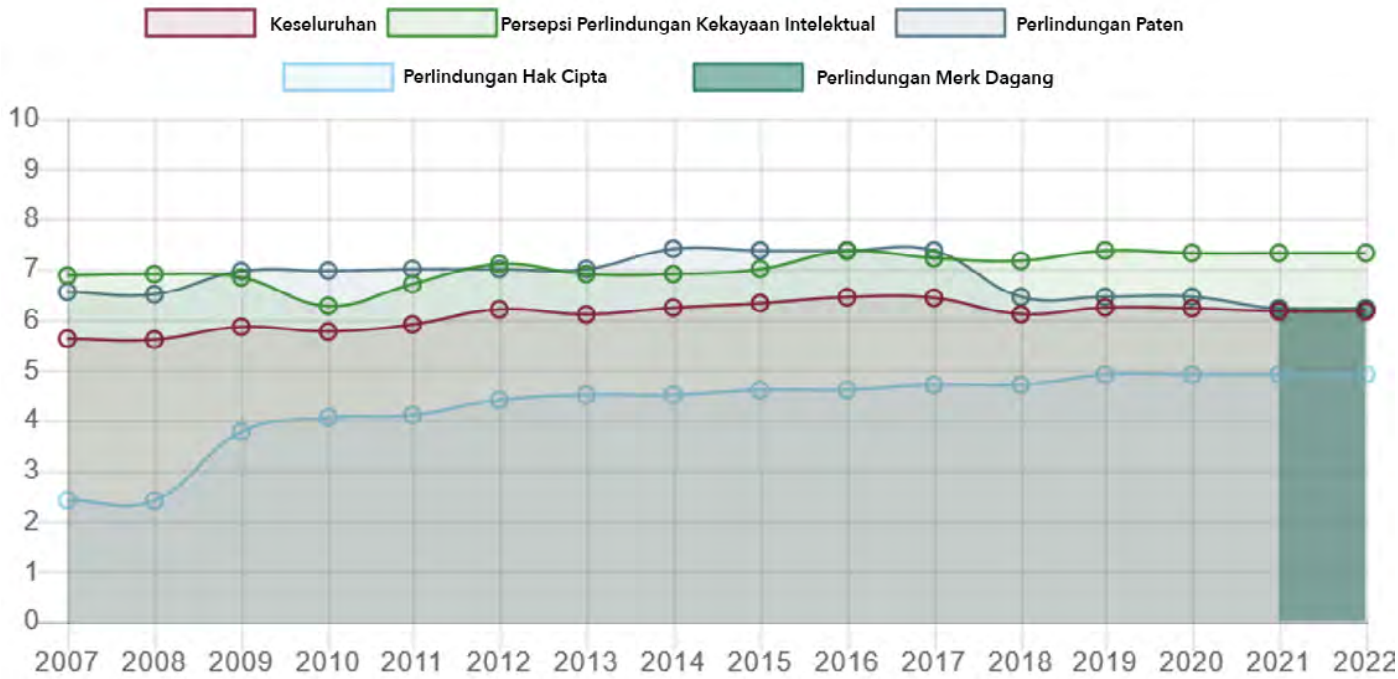

Sumber: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/malaysia.

Agar suatu wilayah kondusif untuk inovasi, ketiga komponen berikut menjadi esensial: lingkungan politik yang stabil, perlindungan atas hak milik, dan pengawasan hak atas kekayaan intelektul.

Dalam skala global, secara keseluruhan Malaysia berada di urutan ke-29, sementara untuk LP, Malaysia berada di peringkat 41. Untuk perlindungan terhadap hak milik, Malaysia menempati urutan ke 28. Untuk perlindungan terhadap HAKI, Malaysia berada di epringkat 32.

Dalam skala regional, Malaysia secara umum berada di peringkat 8, peringkat 9 untuk LP dan perlindungan HAKI, dan peringkat 7 untuk perlindungan hak milik fisik.

Jika melihat sub-komponen yang membentuk skor IPRI, Malaysia perlu untuk melakukan peningkatan di aspek berikut:

- Stabilitas politik;
- Kendali atas korupsi;
- Proses pendaftaran hak milik;
- Perlindungan hak cipta, serta
- Perlindungan paten

7. Kesimpulan.

Tulisan ini tidak hendak membahas kebijakan spesifik tertentu, namun selayaknya hal-hal yang diangkat penulis disini menjadi bahan perhatian bilamana menyusun panduan teoritis dan institusional sebuah strategi *harm reduction*.

Secara khusus, penulis melihat bahwa cara yang tepat menangani "konsumsi kesenangan" hendaknya muncul dari pertimbangan ekonomi matang dan analisa trade-off, alih-alih ambisi belaka, dimana keinginan pembuat kebijakan mengalahkan kebebasan individu.

Mengikuti Ronald Coase, di tengah keberadaan eksternalitas kita hendaknya tidak serta-merta membandingkan kenyataan di pasar dengan visi ideal yang diusung "niat mulia" pembuat kebijakan. Sebaliknya, «pendekatan yang lebih baik nampaknya adalah dengan memulai analisa dari situasi yang mirip dengan situasi aktual, untuk menguji dampak dari perubahan kebijakan dan berusaha memastikan apakah kondisi yang baru tersebut lebih baik atau buruk dari kondisi sebelumnya. Dengan cara ini, masukan-masukan untuk kebijakan akan memiliki relevansi dengan kondisi aktual».

Pada saat yang sama, harus diperhatikan pula bahwa upaya untuk melindungi individu B dari eksternalitas yang disebabkan individu A dapat menciptakan bahaya tak diinginkan (*undesired harm*) dalam bentuk konsumsi kesenangan yang lebih inferior.

Pendekatan dalam tulisan ini berangkat dari gagasan bahwa setiap tindakan manusia, termasuk pembuatan kebijakan, terikat kepada keterbatasan pengetahuan, sehingga mustahil setiap tindakan akan akan berujung kepada tujuan yang dikehendaki, *sic et simpliciter*. Kompleksitas tindakan antar individu dan interaksi yang berlangsung setiap saat seharusnya mendorong pembuat kebijakan menjadi lebih rendah hati dan menyadari keterbatasan pengetahuannya, alih-alih bersikap dengan penuh pretensi pengetahuan.

Lebih lanjut, dalam analisa yang penulis urai, kita dapat melihat bahwa pendekatan tradisional terhadap eksternalitas, yang didasarkan kepada pelarangan dan perpajakan, pada kenyataannya tidak menghentikan konsumsi "barang tercela". Pendekatan yang ada malah melanggar prinsip-prinsip ekuitas horizontal dan vertikal dan karena sifatnya regresif, menggeser konsumsi menuju kualitas yang lebih rendah dan ilegal/gelap, yang berujung kepada pengangguran dan penerimaan fiskal yang lebih rendah.

Pendekatan yang tepat untuk *harm reduction* hendaknya, di satu sisi menghormati kebebasan memilih yang dimiliki individu, dan di sisi lain merawat iklim yang kondusif untuk inovasi. Iklim sedemikian dibangun diatas fondasi institusional yang tepat. Dalam hal ini, Malaysia perlu melakukan peningkatan dalam hal stabilitas politik, kendali atas korupsi, proses pendaftaran hak milik, perlindungan paten serta hak cipta.

References

Coase, R.H. (1960), *The Problem of Social Cost*, «Journal of Law and Economics», 3, pp. 1-44.

Cowen, T. and Tabarrok, A. (2010), *Modern Principles: Microeconomics*, New York, Worth, 2015.

Ferlito, C. (2017), *Who Pays The Duties Of Supply And Demand?*, «Forbes», 7 March, https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/07/who-pays-the-duties-of-supply-and-demand/?sh=1e7198182585.

Ferlito, C. (2022), *Axel Leijonhufvud: A personal recollection from an Austrian perspective*, «PSL Quarterly Review», 75, 302, pp. 299-310, DOI: https://doi.org/10.13133/2037-3643/17888.

von Hayek, F.A. (1937), *Economics and Knowledge*, «Economica», 4, 13, pp. 33-54.

von Hayek, F.A. (1945), *The Use of Knowledge in Society*, «American Economic Review», 35, 4, pp. 519-530.

von Hayek, F.A. (1989), *The Pretence of Knowledge*, «American Economic Review», 79, 6, pp. 3-7.

Heyne, P.L, Boettke, P.J. and Prychitko, D.L. (2014), *The Economic Way of Thinking*, Harlow, Pearson Education.

Hoffer, A., Lim, A.B., Sazuki, F., Weerasena, B. and Ferlito, C. (2021), *International Best Practices for Tobacco and Nicotine Public Policy*, Washington, DC, Property Rights Alliance.

Hoffer, A. and Ferlito, C. (2021), *Reward smokers who want to quit, not punish them with taxes*, «Free Malaysia Today», 22 November, https://www.freemalaysiatoday.com/category/opinion/2021/11/22/reward-smokers-who-want-to-quit-not-punish-them-with-taxes/.

Kasper, W., Streit, M.E. and Boettke, P.J. (2012), *Institutional Economics. Property, Competition, Policies,* Cheltenham and Northampton, Edward Elgar.

McCloskey, D.N. (2006), *The Bourgeois Virtues. Ethics for an age of commerce*, Chicago and London, The University of Chicago Press.

McCloskey, D.N. (2010), *Bourgeois Dignity. Why economics can't explain the modern world*, Chicago and London, The University of Chicago Press.

McCloskey, D.N. (2016), *Bourgeois Equality. How ideas, not capital or institutions, enriched the world*, Chicago and London, The University of Chicago Press .

von Mises, L. (1949), *Human Action. A Treatise on Economics*, Auburn, Ludwig von Mises Institute, 1998.

Mitchell, D. (2017), *Malaysia's Tax System. Friend or Foe to Prosperity?*, IDEAS Policy Paper N. 38, Kuala Lumpur, Institute for Democracy and Economic Affairs.

Ostrom, E. (2009), *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems,* «American Economic Review», 100, 3, pp. 641-672.

Pigou, A.C. (1920), *The Economics of Welfare,* London, Macmillan, 1932.

Rizzo, M.J. and Whitman, G. (2020), *Escaping Paternalism. Rationality, Behavioral Economics, and Public Policy,* Cambridge, Cambridge University Press.

Schumpeter, J.A. (1911), *The Theory of Economic Development*, New Brunswick and London, Transaction Publishers, 2012.

Sunde, D. (2019), *Toward 'humanomics': Deirdre McCloskey on honoring the world of human creation*, «Acton.org», January 14, https://blog.acton.org/archives/105746-toward-humanomics-deirdre-mccloskey-on-honoring-the-world-of-human-creation.html.

The Star (2019), *Big losses from illicit cigarettes,* «The Star», 10 August, https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/08/10/big-losses-from-illicit-cigarettes.

Tollison, D. and Wagner, R.E. (1992), *The Economics of Smoking*, New York, Springer.

Varian, H.R. (2010), *Intermediate Microeconomics. A Modern Approach*, New York and London, W.W. Norton & Company.

Center for Market Education Indonesia

The Center for Market Education (CME) is a boutique think-tank based in Kuala Lumpur, Malaysia, and in Jakarta, Indonesia.

As an academic and educational institution, CME aims to promote a more pluralistic and multidisciplinary approach to economics and to spread the knowledge of a sounder economics, grounded in the understanding of market forces.

In order to do so, CME is not only involved in academic initiatives, but it organizes seminars, webinars and tailor-made economics classes for students, journalists, business people and professionals who wish to better understand the relevance of economics for their daily lives and activities.

Economics matters and needs to be presented in a fashion in which the link with reality is clearly visible. In this sense, we look not only at theoretical economics but also at policy making, with an emphasis on the unintended consequences generated by political actions.

centerformarketeducation@gmail.com
No. 53, Jalan SS15/4, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
marketedu.me
CenterMarketEdu
CenterforMarke1
Center For Market Education
@centerformarketeducation2495